



**BUPATI BULUNGAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan/atau antar Jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2018 ;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 188.44/Ev/K.16/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**dan**  
**BUPATI BULUNGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 4 diubah sebagai berikut :

**1.** Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, semula berjumlah Rp.1.172.210.305.833,11 bertambah sejumlah Rp.118.823.181.876,99 sehingga menjadi Rp.1.291.033.487.710,10 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah :

1. Semula	Rp.1.037.210.305.833,11	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 106.106.575.170,10</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp.1.143.316.881.003,21

b. Belanja :

1. Semula	Rp.1.172.210.305.833,11	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 118.823.181.876,99</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp.1.291.033.487.710,10</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		(Rp. 147.716.606.706,89)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan :

a) Semula	Rp.135.000.000.000,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 12.716.606.706,89</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 147.716.606.706,89

2. Pengeluaran :

a) Semula	Rp. NIHIL	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. NIHIL
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 147.716.606.706,89
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. NIHIL

**2.** Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah :
- |   |                              |                       |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula                                       | Rp.76.528.019.500,00         |                       |
| 2. Bertambah/(Berkurang)                        | <u>Rp. 3.287.099.998,43.</u> |                       |
| Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan |                              | Rp. 79.815.119.498,00 |
- b. Dana Perimbangan :
- |   |                               |                       |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula                                 | Rp.837.467.106.000,00         |                       |
| 2. Bertambah/(Berkurang)                  | <u>(Rp.72.045.758.389,00)</u> |                       |
| Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan |                               | Rp.909.512.864.389,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :
- |   |                              |                       |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula   | Rp.123.215.180.333,11        |                       |
| 2. Bertambah/(Berkurang)                                      | <u>Rp. 30.773.716.782,67</u> |                       |
| Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan |                              | Rp.153.988.897.115,78 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pajak Daerah :
- |                                       |                             |                       |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula                             | Rp.10.151.150.000,00        |                       |
| 2. Bertambah/(Berkurang)              | <u>Rp. 2.000.000.000,00</u> |                       |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan |                             | Rp. 12.151.150.000,00 |
- b. Retribusi Daerah :
- |   |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|
| 1. Semula                                 | Rp.7.436.869.500,00 |                      |
| 2. Bertambah/(Berkurang)                  | <u>Rp. Nihil .</u>  |                      |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan |                     | Rp. 7.436.869.500,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
- |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Semula  | Rp.16.800.000.000,00 |                      |
| 2. Bertambah/(Berkurang)   | <u>Rp. Nihil .</u>   |                      |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan |                      | Rp.16.800.000.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :
- |  |                              |                      |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1. Semula  | Rp.42.140.000.000,00         |                      |
| 2. Bertambah/(Berkurang)   | <u>Rp. 1.287.099.998,43.</u> |                      |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan |                              | Rp.43.427.099.998,43 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil :
- |  |                                |                       |
|--|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula                                | Rp.177.730.027.000,00          |                       |
| 2. Bertambah/(Berkurang)                 | <u>(Rp. 72.045.758.389,00)</u> |                       |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan |                                | Rp.249.775.785.389,00 |
- b. Dana Alokasi Umum :
- |                          |                       |  |
|--------------------------|-----------------------|--|
| 1. Semula                | Rp.497.449.426.000,00 |  |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. Nihil .</u>    |  |

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp.470.131.592.000,00

c. Dana Alokasi Khusus :

1. Semula Rp.162,287.653.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. Nihil .

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 162,287.653.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah :

1. Semula Rp.22.084.514.054,11

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. Nihil.

Jumlah Hibah setelah perubahan Rp. 22.084.514.054,11

b. Dana Darurat :

1. Semula Rp. NIHIL

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. NIHIL

c. Dana Bagi Hasil Pajak :

1. Semula Rp.31.599.101.279,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 4.475.725.782,67

=

Jumlah Bagi hasil Pajak setelah perubahan Rp.36.074.827.061,67

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :

1. Semula Rp.67.596.565.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 4.648.991.000,00

Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp.72.245.556.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainya :

1. Semula Rp. 1.935.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 21.649.000.000,00.

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainya setelah perubahan Rp.23.584.000.000,00

**3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

1. Semula Rp.627.234.759.809,89

2. Bertambah/(Berkurang) (Rp. 62.345.967.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 689.580.726.809,89

b. Belanja Langsung :

1. Semula Rp.544.975.546.023,22

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 56.477.214.876,99

	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.601.452.760.900,21
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :	
	a. Belanja Pegawai :	
	1. Semula	Rp.472.537.544.109,29
	2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 35.144.136.861,10</u>
	Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp.507.681.680.970,39
	b. Belanja Bunga :	
	1. Semula	Rp. NIHIL
	2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp. -
	c. Belanja Subsidi :	
	1. Semula	Rp. NIHIL
	2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>
	Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp. -
	d. Belanja Hibah :	
	1. Semula	Rp. 16.519.144.000,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 19.997.255.000,00</u>
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 36.516.399.000,00
	e. Belanja Bantuan Sosial :	
	1. Semula	Rp.500.000.000,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 500.000.000,00
	f. Belanja Bagi Hasil :	
	1. Semula	Rp. NIHIL
	2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. -
	g. Belanja Bantuan Keuangan :	
	1. Semula	Rp.135.678.071.700,60
	2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 7.204.575.138,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.142.882.646.839,50
	h. Belanja Tidak Terduga :	
	1. Semula	Rp.2.000.000.000,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :	
	a. Belanja Pegawai :	
	1. Semula	Rp.61.711.097.800,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 541.833.964,00</u>
	Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp. <u>62.252.931.764,00</u>

b. Belanja Barang dan Jasa :

1. Semula	Rp.292.964.895.021,22	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 32.547.299.398,99</u>	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 325.512.194.420,21

c. Belanja Modal :

1. Semula	Rp.190.299.553.202,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 23.388.081.514,00</u>	
Jumlah Belanja modal setelah perubahan		Rp.213.687.634.716,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan :

1. Semula	Rp.135.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 12.716.606.706,89</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 147.716.606.706,89

b. Pengeluaran :

1. Semula	Rp. NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. NIHIL

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :

1. Semula	Rp. 135.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 12.716.606.706,89</u>	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp. 147.716.606.706,89

b. Pencairan Dana Cadangan :

1. Semula	Rp. NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan		Rp. NIHIL

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan :

1. Semula	Rp. NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. NIHIL

d. Penerimaan Pinjaman Daerah :

1. Semula	Rp. NIHIL	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp. NIHIL

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :

1. Semula Rp. NIHIL
  2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.
- Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp. NIHIL

f. Penerimaan Piutang Daerah :

1. Semula Rp. NIHIL
  2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.
- Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp. NIHIL

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan :

1. Semula Rp. NIHIL
  2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.
- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. NIHIL

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :

1. Semula Rp. NIHIL
  2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.
- Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. NIHIL

c. Pembayaran Pokok Hutang :

1. Semula Rp. NIHIL
  2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.
- Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah perubahan Rp. NIHIL

d. Pemberian Pinjaman Daerah :

1. Semula Rp. NIHIL
  2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL.
- Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. NIHIL

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;



7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
  8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
  11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
  12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
  13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,**

**JOTAM.L.SALLATA, SH  
Pembina Tk.I/ IVb  
Nip.19630506 199203 1 009**

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 16 Oktober 2018

**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd**

**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 16 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**ttd**

**SYAFRIL**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 5**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA:  
34/5/2018

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PARAF</b>
1.	Inggong Ala, SE., M.Si	Wakil Bupati	
2.	Drs. Syafril	Sekretaris Daerah	
3.	Drs. Kornelis Elbaar, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
4.	P. Tumanggor, SE., MM	Kepala BPKAD	
5.	Jotam L Sallata, SH, MM	Kepala Bagian Hukum	